

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Strategi Pengembangan Pelayanan Digital Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kabupaten Banyumas di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten dengan fokus teori Tahapan Manajemen Strategis dari Ritonga (2020), dari tahap Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi, dijelaskan sebagai berikut

1. Perencanaan

Pada tahapan perencanaan, dalam pengembangan pelayanan digital sudah dilakukan dengan baik. Dimana dalam pelaksanaannya terdapat tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tujuan tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan Misi Bupati Kabupaten Banyumas dalam “Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermanfaat.” Sehingga dapat terciptanya cita cita Bupati Kabupaten Banyumas dalam Menjadikan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas diberikan wewenang sebagai Perangkat Daerah yang membangun dan mengembangkan sistem perangkat lunak di Kabupaten Banyumas. Oleh

karena itu, hubungan kerjasama akan terjalin antara Perangkat Daerah pengusul dan Dinkominfo sebagai pembangun sistem. Dalam perancangan, dilaksanakan rapat yang berangendakan pemersatuan persepsi dari sebuah inovasi yang ada. Pemersatuan persepsi tujuan untuk mewujudkan suatu gagasan inovasi yang sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan regulasi regulasi yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Perangkat Lunak di Kabupaten Banyumas. Selain itu, dengan mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk membangun suatu aplikasi sistem pelayanan di Dinkominfo Kabupaten Banyumas maka akan memberikan kemudahan bagi Kabupaten Banyumas dalam mengintegrasikan seluruh sistem pelayanan berbasis digital di Kabupaten Banyumas di dalam satu server yang disebut *e-office*.

2. Implementasi

Pada tahap implementasi, sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Melihat dari penanganan terhadap kendala yang hadir disaat implementasi, dapat secara mudah di berikan solusi dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait. Kendala yang hadir akan segera ditindak secara langsung dikarenakan pihak yang membuat aplikasi pelayanan merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas khusus dalam perawatan aplikasi digital yang sudah dibangun. Hal ini didasari pada Pasal 12 Ayat 6 Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Perangkat Lunak yang menyebutkan

“Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan perangkat lunak wajib memelihara keberlangsungan perangkat lunak tersebut.” Sehingga Perangkat Daerah terkait tidak memerlukan pihak ketiga dalam melahirkan suatu aplikasi sistem pelayanan digital di Kabupaten Banyumas.

3. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Dinkominfo Kabupaten Banyumas memberikan kekuasaan kepada Perangkat Daerah terkait dalam mengevaluasi dan menilai indeks kepuasan masyarakatnya yang diukur dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi yang sudah ada. Selain itu, pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas sudah menyediakan aplikasi Susanmas yang dapat diakses untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan Perangkat Daerah di seluruh Kabupaten Banyumas. Dalam pemanfaatannya setiap Bbadan dan Dinas di Kabupaten Banyumas juga sudah mewajibkan penggunaan Aplikasi Susanmas dalam mengukur hasil penilaian dari masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan untuk Tindakan evaluasi dan secara berskala hasilnya di kumpulkan ke Sekretariat Daerah Bagian Organisasi. Dan hasil evaluasi yang memungkinkan terjadinya perubahan pada sistem pelayanan digital yang ada dapat dilakukan dengan kembali memberikan permohonan kepada Dinkominfo Kabupaten Banyumas.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan terkait penelitian Strategi Pengembangan Pelayanan Digital Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kabupaten Banyumas di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten, maka dapat diperoleh implikasi dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penggunaan aplikasi susanmas dalam mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah terkait, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan menjadi bahan evaluasi dalam implementasi aplikasi layanan berbasis digital.
2. Mendorong Kabupaten sekitar Kabupaten Banyumas untuk dapat menciptakan satu sistem integrasi pelayanan digital, untuk menciptakan pelayanan yang simpel dan mudah dijangkau masyarakat.
3. Menghimbau Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas yang belum menciptakan gagasan pelayanan digital, untuk dapat menciptakan gagasan baru guna mendukung sistem pelayanan yang terintegrasi dan mewujudkan misi dari Bupati Banyumas. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan studi banding ke Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan gagasannya.